



KUHP BARU BIKIN RESAH HARUSKAH RAKYAT PASRAH?

DPR RI dan pemerintah akhirnya mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna yang digelar di kompleks parlemen, Selasa (6/12). Wacana positif yang digaungkan pemerintah salah satunya adalah KUHP yang sebelumnya merupakan warisan kolonial. Sehingga, harus diubah sesuai dengan perkembangan kehidupan saat ini, baik nasional maupun internasional. Perdebatan soal perubahan pun telah lebih dari 60 tahun berjalan. Tarik ulur draft RKUHP dikatakan melintasi 7 presiden dan 14 periode DPR RI. Fakta yang disajikan itu tidak keliru. Tetapi mengabaikan keresahan masyarakat terkait pasal-pasal kontroversial di KUHP baru. Bahkan saat gelombang protes membesar, pemerintah malah bilang 'tak perlu demo-demo'. Rakyat dipersilahkan mengugat ke Mahkamah Kontitus (MK). Aktivis dan ahli hukum pun khawatir, saat dilakukan 'judicial review' hakim sulit adil. Sebab pengalaman sebelumnya mengajarkan, saat 'juru adil' tak sejalan dengan 'wakil rakyat' maka bisa saja dibayang-bayangi pemecatan. Di-Aswanto-kan?

(Baca Hal 11)

Foto :
Istimewa

**JEJAK
PANJANG
PENGGODOKAN
KUHP BARU**

**DISKURSUS RUU KUHP
MELINTASI 7 PRESIDEN, YAITU:**



Presiden Soekarno



Presiden Soeharto



Presiden BJ Habibie



Presiden Gus Dur



Presiden Megawati



Presiden SBY



Presiden Jokowi

**DI DPR RUU KUHP
MELINTASI
13 KALI
PERIODE, YAITU:**

1. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) 26 Jun 1960 - 15 Nov 1965
2. DPR GR minus Partai Komunis Indonesia (PKI) 15 Nov 1965 - 19 Nov 1966
3. DPR GR Orde Baru 19 Nov 1966 - 28 Okt 1971
4. DPR hasil Pemilu ke-2, 28 Okt 1971 - 1 Okt 1977
5. DPR hasil Pemilu ke-3, 1 Okt 1977 - 1 Okt 1982
6. DPR hasil Pemilu ke-4, 1 Okt 1982 - 1 Okt 1987

7. DPR hasil Pemilu ke-5, 1 Okt 1987 - 1 Okt 1992
8. DPR hasil Pemilu ke-6, 1 Okt 1992 - 1 Okt 1997
9. DPR hasil Pemilu ke-7, 1 Okt 1997 - 1 Okt 1999
10. DPR hasil Pemilu ke-8, 1 Okt 1999 - 1 Okt 2004
11. DPR hasil Pemilu ke-9, 1 Okt 2004 - 1 Okt 2009
12. DPR hasil Pemilu ke-10, 1 Okt 2009 - 1 Okt 2014
13. DPR hasil Pemilu ke-11, 1 Okt 2014 - 1 Okt 2019

14. DPR hasil Pemilu ke-11, 1 Okt 2019 - 2024
- Perdebatan RKUHP melintasi 19 Menteri Kehakiman**
Sahardjo, Wirjono Prodjodikoro, Astrawinata, Oemar Seno Adji, Mochtar Kusumaatmadja, Mudjono, Ali Said, Ismail Saleh, Oetoyo Oesman, Muladi, Yusril Ihza Mahendra, Baharuddin Lopa, Marsilam Simanjuntak, Mahfud MD, Hamid Awaluddin, Andi Mattalata, Patrialis Akbar, dan Amir Syamsuddin.

**Government (Hal.2)
Jember hingga
Solili Gempa Bumi,
Akhir Tahun RI
Paling Rawan
Bencana?**

Jember hingga Sofifi Gempa Bumi, Akhir Tahun RI Paling Rawan Bencana?

JAKARTA- Sejumlah bencana besar berulang kali terjadi di Indonesia saat akhir tahun. Belum lama ini gempa Cianjur pada 21 November 2022 lalu yang menelan korban jiwa hingga 334 orang. Bahkan, sampai saat ini, 8 orang masih dilaporkan hilang tertimbun. Disusu erupsi Gunung Semeru yang memicu ribuan warga mengungsi. Dan, Selasa (6/12) Jawa Timur (Jatim) kembali dirundung bencana saat gempa magnitudo 6,2 mengguncang bagian Barat Daya Jember, sekitar pukul 13.07 WIB.

Dari peta yang ditunjukkan BMKG, gempa terjadi di laut lepas. Guncangan dilaporkan dirasakan hingga ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan catatan BNPB, beberapa bencana besar memang terjadi jelang atau saat akhir tahun. Misalnya, erupsi Gunung Merapi pada 5 November 2010 lalu, gempa dan likuifaksi di Donggala pada 28 September 2018, hingga tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 silam.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menginstruksikan kepada jajaran menteri kabinet Indonesia Maju agar mengantisipasi bencana cuaca ekstrem di penghujung tahun 2022. "Di penghujung 2022 memasuki 2023 ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama antisipasi bencana cuaca ekstrem dan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas agar kita semuanya memberikan perhatian, memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG sebagai peringatan dini," tuturnya saat rapat kabinet, Selasa (6/12).

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta jajarannya agar memastikan kehadiran Negara dalam penanganan bencana, baik pemberian bantuan kemanusiaan dan juga rekonstruksi bangunan terdampak bencana. "Dan memastikan negara betul-betul hadir, segerakan bantuan kemanusiaan dan juga segerakan rekonstruksi bangunan yang terdampak gempa ataupun bencana lainnya apabila memang keadaannya sudah memungkinkan untuk segera dimulai," tuturnya.

Namun, benarkah bencana-bencana besar memang akan sering terjadi saat akhir tahun di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa bencana alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. "Sehingga kita semua patut waspada (terhadap seluruh bencana)," tulis BMKG dalam keterangan resminya.

Terlebih lagi, bencana-bencana alam tersebut tidak dapat diprediksi secara pasti kapan waktunya akan terjadi. Dalam kasus gempa bumi, US Geological Survey menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat membantu para ilmuwan untuk memprediksi bencana secara

tepat.

Karena itu, praduga bahwa banyak bencana akhir tahun di Indonesia tidak dapat dibenarkan dan tidak pula sepenuhnya benar. Meskipun beberapa bencana besar terjadi saat akhir tahun, total bencana dalam setahun tidak selalu terpusat pada trimester keempat.

Merujuk catatan bencana tersebut, tiga bulan dengan jumlah bencana terbanyak justru terjadi pada Februari, Januari, dan Maret atau awal tahun. Sementara itu, bulan dengan jumlah bencana paling sedikit terjadi pada Agustus sebanyak 61 kasus.

Dipicu Patahan Zona Outerise

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan gempa bumi di Jember akibat adanya deformasi atau patahan batuan di zona outerise. "Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan turun (normal fault)," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono di Jakarta, Selasa (6/12).

Daryono menambahkan, gempa bumi itu berdampak dan dirasakan di daerah Jember, Gubukmas, Mataram, Kepanjen, dan Sumberpucung dengan skala intensitas III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan akan truk berlalu). Gempa itu juga dirasakan di daerah Kuta dan Kuta Selatan dengan skala intensitas II-III MMI (getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

Kemudian, daerah Madiun, Ponorogo, Bantul, Yogyakarta, Sawahan, Klaten, Banyuwangi, dan Karangasem dengan skala intensitas II MMI (getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). "Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami," katanya.

Hingga pukul 13.30 WIB, Daryono menyampaikan, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya dua aktivitas gempa bumi susulan (aftershock) dengan kekuatan terbesar M4,6. BMKG mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Selain itu, masyarakat juga diimbau menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. "Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah," katanya.

Dalam YouTube yang sama, menurut Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami, PB Madya di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Supartoyo,



Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres rumah anti gempa untuk warga terdampak di Cianjur, Jawa Barat, Senin (5/12/2022). (Foto-setpres)

menjelaskan gempa Bumi outer rise ini adalah gempa Bumi di luar/belakang megathrust pada zona bending/pelengkungan. Supartoyo

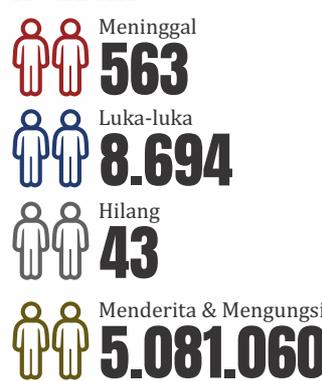
menjelaskan dari peta Pusat Gempa Nasional belum ada peta gempa Bumi outer rise di Indonesia. (moko, azifa, wid, rls/dya)

DATA BENCANA DI INDONESIA 2022

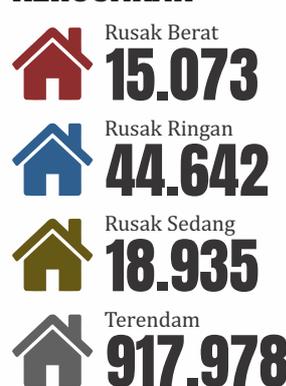
Total 2022 hingga
6 Desember

3.322 BENCANA

KORBAN



KERUSAKAN



DATA BENCANA BNPB BERDASARKAN BULAN (BNPB-2021)



Menyoal 'Dimatikannya' TV Analog DPR Nilai Distribusi STB 'Mbleset' dan Beratkan Ekonomi Rakyat



Pembeli memilih Set Top Box (STB) TV Digital di salah satu toko kawasan Glodok, Jakarta Barat. (Foto-istimewa)

JAKARTA-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemutusan TV Analog Tahap II di 25 kabupaten/kota lima wilayah, yaitu Batam, Bandung, Semarang, Surakarta, dan Surabaya. Sehingga total kabupaten/kota yang sudah dilaksanakan Analog Switch Off (ASO) berjumlah 255.

Sayangnya kemelut masih terus terjadi dalam pelaksanaannya. DPR RI menyoroti 'mbleset' atau tidak tepat sasaran pendistribusian Set Top Box (STB). Bahkan harga STB di pasar terus naik hingga menyentuh Rp 600.000.

Di Yogyakarta misalnya, harga jual STB tidak masuk akal karena mencapai Rp 600.000 dan sangat memberatkan masyarakat. "Sekarang harga STB Rp500 ribu-Rp600 ribu, dan itu memberatkan bagi masyarakat yang pendapatannya Rp1,5 juta per bulan dan itu banyak yang seperti itu," kata Anggota DPR RI Sukamta dalam salah satu forum dengan Kominfo dikutip Selasa (6/12).

Dia menjelaskan, harusnya harga STB dapat dijaga tetap di kisaran Rp160 ribu hingga Rp200 ribu seperti sebelum ASO diberlakukan. Sebab, dengan harga jual sebesar itu pun produsen sebetulnya dapat mengantongi keuntungan, karena ongkos produksi satu STB hanya Rp50 ribu.

"Dulu harga Rp160 ribu-Rp200 ribu, ini kan sudah lebih dari cukup, karena harga produksi kan cuma Rp50 ribu, masa dijual Rp400-600 ribu sih," ujarnya.

Dia pun meminta pemerintah untuk tetap mengedepankan simpati

dalam mengambil kebijakan, utamanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan ekonomi masyarakat. "Yang agak simpati dikit itu, lho, terhadap masyarakat," tegasnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto. Dia mengatakan, pengadaan dan pendistribusian STB belum tepat sasaran. Oleh karenanya, Utut pun meminta agar Kominfo melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh stakeholders terkait guna melakukan re-commitment migrasi ASO dan audit pendistribusian STB. Hal tersebut diperlukan agar migrasi dan distribusi berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

"Anggaran untuk Set Top Box tahun 2022 sebesar Rp382 miliar atau 1 juta titik kemudian tahun 2023 sebesar Rp28 miliar untuk 80 ribu titik. Sebagai pengawas sudah sepatutnya kami mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi," ungkap Utut.

Tak hanya itu, Politikus PDI-Perjuangan ini juga mendorong Kominfo untuk memastikan penggunaan data Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tepat dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) serta Lembaga Penyiaran Penyelenggara Multipleksing.

Utut menambahkan, Komisi I DPR RI akan menjadwalkan Rapat Kerja dengan Menkominfo untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait kesinambungan pelaksanaan ASO ke depannya. Dan menjadwalkan RDPU dengan Lembaga Penyiar termasuk Lembaga Penyiar Penyelenggara Multipleksing untuk menyampaikan

komitmen terkait program ASO.

"Nanti akan kita bawa ke Senayan untuk Rapat dengan Menkominfo dan seluruh stakeholders terkait karena anggarannya ini cukup besar jangan sampai masyarakat ini merasa rugi apalagi siara TV itu kan hiburan utama bagi masyarakat pedesaan," tutupnya

Swasta Baru Salurkan 5,3%

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mengevaluasi terkait migrasi siaran televisi analog ke digital bersama Komisi I DPR RI.

ALASAN TV ANALOG PERLU SET TOP BOX TV DIGITAL

TV DIGITAL

- Antena rumah menangkap sinyal digital dari antena pemancar
- TV digital sudah memiliki chip digital
- Sehingga, ia bisa langsung memproses gambar dan suara sinyal digital ke pesawat TV



Salah satunya, membahas pendistribusian Set Top Box (STB) yang disalurkan kepada masyarakat miskin.

Direktur Penyiaran Kementerian Kominfo, Geryantika Kurnia mengatakan, penyaluran STB gratis sedianya dilakukan oleh swasta dan pemerintah. Namun, penyaluran STB yang dilakukan oleh pihak swasta saat ini baru mencapai 5,3 persen. Sedangkan, dari pemerintah pendistribusian telah mencapai 100 persen.

Menurutnya, STB gratis yang disalurkan untuk masyarakat miskin sebanyak 5,6 juta. Total dari 5,6 juta itu berasal dari swasta yang memenangkan seleksi atau evaluasi infrastruktur digital sebagai komitmennya.

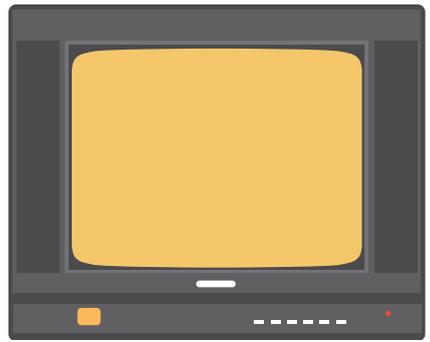
"Dari komitmennya, dari grup SCM, menyalurkan sekitar 1,2 juta STB untuk keluarga miskin. Yang kedua, dari MNC grup sekitar 1,1 juta STB. Kemudian grup Metro, sekitar 700 ribu STB, kemudian grup Trans itu 600 ribu STB dari RTV 500 ribu STB dan Viva 150 ribu STB," papar Geryantika dalam evaluasi yang digelar di Hotel Bogor Icon Kota Bogor.

Dari hasil evaluasi tersebut, pihak swasta baru melakukan penyaluran STB kepada masyarakat sebesar 5,3 persen atau sebanyak 4,3 juta unit. Artinya, ada 1,3 juta yang kurang dan itu yang menyalurkan adalah pemerintah.

Geryantika mengatakan, pemerintah telah mendistribusikan STB sekitar 1,2 juta STB atau hampir 100 persen. "Jadi yang dievaluasi itu adalah gimana caranya mempercepat agar komitmen STB dari swasta ini terdistribusikan," ungkapnya. (wid,rls,ist/dya)

TV ANALOG

- Antena rumah menangkap sinyal digital dari antena pemancar
- Tapi, TV analog cuma punya chip untuk mengerti "bahasa" sinyal analog menjadi gambar dan suara
- Sehingga dibutuhkan set top box sebagai penerjemah "bahasa" sinyal digital agar bisa dimengerti oleh chip analog
- Setelah diterjemahkan, chip TV analog pun bisa memproses suara dan gambar dari sinyal digital ke pesawat TV



Demi Ketersediaan Pangan Bulog dan **BUMN Pangan Bisa Utang**



Ilustrasi stok pangan.

SURABAYA - Untuk menjaga kestabilan dan ketersediaan pangan, pemerintah mengeluarkan skema baru, di mana Bulog dan BUMN pangan seperti PT RNI Persero (ID Food) bisa mendapat utang bank berbunga murah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah sudah mempersiapkan melalui Menteri Keuangan di mana nilai pinjaman baik itu untuk Bulog atau ID Food dengan rate tertentu yang lebih rendah daripada rate pasar. "Mekanismenya sedang disiapkan oleh pemerintah," kata Airlangga seperti dikutip dari Antara, Selasa (6/12/2022).

Skema utang itu dilakukan terkait dengan kondisi stok di Bulog dan BUMN pangan dalam kondisi kritis. Airlangga mengatakan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Selasa (6/12/2022) ini, Presiden Jokowi memerintahkan jajaran menteri dan kepala lembaga agar meningkatkan ketersediaan cadangan nasional untuk seluruh komoditas, tidak hanya beras.

Hal itu dilakukan guna mengantisipasi kondisi perekonomian pada 2023 yang diperkirakan masih dibayangi ketidakpastian akibat potensi krisis pangan, krisis keuangan, dan penurunan ekspor.

"Untuk peningkatan cadangan nasional tentu harus diperhatikan seluruh komoditas baik itu beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, daging sapi, ayam ras, telur, gula konsumsi, minyak goreng, dan juga cabai rawit," kata Airlangga.

Kepala Badan Pangan Nasional (BPN), Arif Prasetyo Adi mengungkapkan memang kondisi stok pangan di Bulog dan BUMN Pangan dalam kondisi kritis. Pernyataan ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12/2022) lalu.

Ia menjabarkan cadangan bahan

pangan yang dimiliki pemerintah saat ini hanya beras, gula pasir, daging kerbau, dan sedikit minyak goreng. "Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit di minyak goreng," ujar Arif dikutip dari CNN Indonesia.

Secara rinci, beras yang dimiliki pemerintah adalah 515.119 ton. Padahal, kebutuhan bulanan nasional beras mencapai 2,5 juta ton. Artinya, pemerintah hanya memiliki cadangan sebesar 21 persen dari kebutuhan nasional.

Sedangkan untuk gula pasir, pemerintah lewat Bulog, ID Food, dan PTPN memiliki total stok 393.141 ton dari kebutuhan bulanan nasional sebesar 268.241 ton. Jumlah ini surplus atau mencapai 147 persen dari kebutuhan.

Perum Bulog juga mengkonfirmasi mengenai cadangan beras yang mulai menipis. Karena itu, pihaknya fokus memperbanyak stok beras. "Seperti yang disampaikan Pak Arif (Kepala Badan Pangan Arif Prasetyo Adi) cadangan pangan pemerintah saat ini sesuai penugasan kan baru beras," ujar Kabag Humas dan Kelembagaan Perum Bulog Tomi Wijaya.

Di satu sisi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti ancaman krisis pangan bisa memicu gejolak sosial dan politik. Karenanya, ia meminta agar cadangan beras benar-benar dihitung.

"Krisis pangan hati-hati mengenai ini karena nanti bisa larinya masalah sosial dan politik sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung semuanya itu, betul-betul hitung," ujar Jokowi dalam Sidang Kabinet di Istana Negara yang ditayangkan secara virtual, Selasa (6/12/2022).

Jokowi mengingatkan jangan sampai jajarannya salah hitung mengenai ketersediaan pasokan beras sehingga menyebabkan harganya naik. "Jangan sampai perhitungan kita keliru sehingga kita tidak menyiapkan reserve (atau) cadangan. Pada suatu

titik cadangan kita habis dilihat oleh pedagang dan akhirnya harga beras pasti akan naik," ujarnya.

Presiden juga menyerukan agar soal data dan kebijakan ini terus dirembug dengan berbagai pihak agar terjadi sinergi data dan langkah keijakan dalam menyikapinya. "Lakukan konsolidasi data, konsolidasi konsolidasi kebijakan dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi," katanya.

Untuk kesekian kalinya presiden juga mengingatkan bahwa dunia masih tidak baik-baik saja. Untuk itu, ia meminta jajarannya untuk memperhitungkan dengan benar kebijakan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.

"Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga dan jangan terjebak pada egosektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi policy dan juga konsolidasi dari pelaksanaan implementasi," ujarnya.

Soal tanggapan atas rencana impor beras sebelumnya disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan peninjauan dan kalkulasi ulang dalam rangka menjaga stok beras di Badan Urusan Logistik (Bulog), salah satunya melalui impor beras.

"Sekarang ini stok beras sedang ditinjau dan dihitung kembali kecukupannya, apabila kurang maka (Pemerintah) akan melakukan impor. Tetapi bila cukup (stok beras), maka tidak jadi impor. Jadi itu sifatnya kalau ada kekurangan saja," kata Ma'ruf, dikutip dari msn.com, Senin (5/12/2022).

Ia juga mendorong agar upaya intensifikasi pertanian terus dilakukan agar tak terjadi kelangkaan pangan terutama beras, khususnya untuk menghadapi krisis pangan yang tengah melanda dunia saat ini.

"Ya kita memang sudah mengantisipasi untuk melakukan berbagai upaya-upaya terutama masalah beras serta kebutuhan

yang lainnya dan melalui upaya intensifikasi," ujarnya.

Dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Selatan (Sulsel) tempo hari, Ma'ruf Amin sempat menanyakan apa yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) dalam menghadapi krisis pangan. "Mereka melakukan intensifikasi berbagai hal, baik dari bibit, pengelolaan tanah, dan ternyata naik 250.000 ton pada 2022," imbuhnya.

Meski begitu, kata Ma'ruf, masih ada daerah-daerah yang mengalami gagal panen. "Jadi ini ada di daerah-daerah yang lain dan mungkin juga yang tidak berhasil. Menurut laporan diperkirakan memang terpenuhi, tetapi memang mungkin ada panen-panen yang kebanjiran di beberapa daerah, karena itu sekali lagi sekarang ini stok beras sedang ditinjau dan dihitung kembali kecukupannya," ungkapnya. (lut/dya)



Krisis pangan hati-hati mengenai ini karena nanti bisa larinya masalah sosial dan politik sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung semuanya itu, betul-betul hitung,"

JOKO WIDODO
Presiden RI



Marak Penipuan Bermodus Kiriman Paket yang Bisa Meretas Ponsel Korban

SURABAYA – Belakangan ini marak penipuan bermodus pesan singkat pemberitahuan kiriman paket khususnya di Jakarta. Bahkan, para penipu ini bisa meretas ponsel para korban. Kasus ini pun menjadi perhatian serius dari pihak Kepolisian khususnya Polda Metro Jaya.

Mencuatnya penipuan dengan modus pengiriman paket ini bermula dari unggahan di media sosial tentang tangkap layar percakapan antara pihak yang mencatat nama perusahaan jasa ekspedisi dan memberi tahu soal adanya kiriman paket. Unggahan tersebut menghebohkan jagat mediasosial.

Dalam unggahan tersebut diketahui pelaku pura-pura mengirimkan file berisi foto paket kepada korbannya, namun foto tersebut ternyata mempunyai ekstensi APK. Jika ekstensi itu dibuka (diklik) maka diduga data dan ponsel korban akan diretas. Korban yang memang sedang menunggu paket dari jasa ekspedisi kemudian membuka file tersebut namun tidak terjadi apa-apa.

Dalam unggahan itu diceritakan bahwa tak lama setelah itu korban mendapat notifikasi atau pemberitahuan transaksi dari aplikasi perbankan yang terpasang di ponselnya. Padahal korban mengaku tidak pernah bertransaksi. Saat korban mengecek saldo rekeningnya ternyata diketahui saldonya sudah berkurang. Namun unggahan tersebut tidak menjelaskan apakah korban sudah membuat laporan polisi atau belum.

Untuk itu, Polda Metro Jaya meminta kepada korban penipuan bermodus pesan singkat yang berisi pemberitahuan kiriman paket untuk segera melapor ke pihak berwajib.

"Masyarakat khususnya di wilayah Jakarta yang jadi korban kasus seperti itu, agar segera melapor ke pihak kepolisian untuk kami ambil tindakan hukum," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Zulpan kemudian menambahkan bahwa hingga saat ini pihak kepolisian belum menerima laporan dari korban penipuan dengan modus tersebut. "Kami belum terima laporan seperti

itu dari masyarakat yang jadi korban," ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Lebih lanjut Zulpan juga mengimbau kepada publik untuk tidak mudah percaya dengan pihak yang mencatat nama perusahaan jasa ekspedisi. Terutama jika yang bersangkutan merasa tidak pernah memesan atau membeli sesuatu secara daring.

Dia menandakan bahwa penipuan online kerap terjadi karena korban yang mudah percaya dan tidak mencari kebenarannya terlebih dulu akibat terlalu senang karena mendapatkan hadiah dari luar negeri. Penipuan seperti ini bisa dihindari jika mengetahui ciri-ciri modus dari pergerakan pelaku.

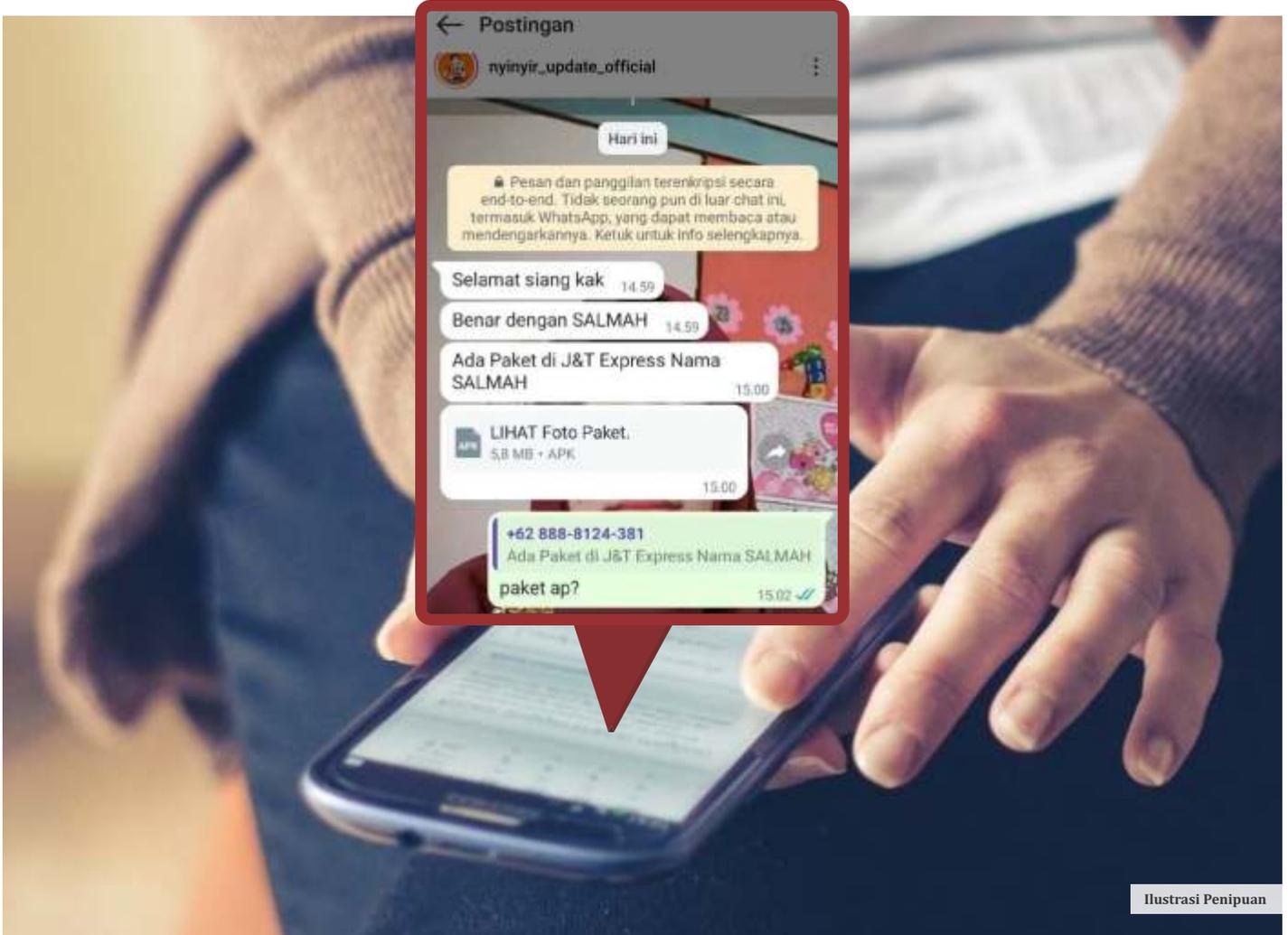
Ada beberapa ciri dan tips yang bisa diketahui agar bisa terhindar dari penipuan tersebut. Mulai dari alur modus penipuan hingga tips mengecek kebenaran dengan meminta bukti yang konkret.

Kemajuan teknologi dengan segala kemudahannya ternyata tak hanya menimbulkan dampak yang positif. Dengan kemudahan tersebut, tak jarang terjadi penipuan terhadap orang-orang yang mudah percaya atas sesuatu yang secara tiba-tiba memberikan mereka harapan atau iming-iming seperti penipuan hadiah palsu yang kerap terjadi.

Kasus yang sering terjadi, penipu mengirimkan pesan jika seseorang telah mendapatkan hadiah atau barang dari luar negeri yang mengharuskan penerima hadiah untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebagai pengganti biaya bea cukai dan biaya admin lainnya agar barang tersebut bisa masuk ke dalam negeri. Tidak hanya itu, pelaku memanfaatkan kurir palsu agar seolah-olah barang sedang dikirim ke tempatmu.

Nantinya setelah korban mentransfer sejumlah uang, pelaku akan pergi dan menghilang tanpa jejak. Di posisi ini, target akan kesulitan untuk melakukan verifikasi baik terhadap pihak kurir dan juga pihak bank yang menjadi penerima uang. Hal ini dikarenakan pengiriman uang bisa tersembunyi oleh batas negara sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memrosesnya. Setelah proses birokrasi antar 2 bank selesai, uang sudah diambil terlebih dahulu oleh si penipu.

Untuk menghindari modus penipuan tersebut ada beberapa ciri-ciri yang bisa diketahui agar bisa mengambil langkah yang tepat ketika ada seseorang yang mencoba melakukan penipuan. Seperti dikutip dari laman Bank BCA berikut ciri-ciri penipuan paket dari luar negeri. (lut/dya/ist)



Ilustrasi Penipuan

CIRI-CIRI PENIPUAN LEWAT PENGIRIMAN PAKET LUAR NEGERI

- Pelaku memiliki 2 bagian tugas. 1 sebagai orang yang modus ke target. 1 bertindak sebagai pemilik kurir palsu.
- Biasanya pelaku akan melakukan pendekatan personal dengan modus berkenalan dengan target melalui sosial media
- Pelaku mengaku akan memberikan hadiah kepada target.
- Setelah itu pelaku akan mengirimkan hadiah melalui kurir palsu dan mengirimkan resi palsu kepada target.
- Selanjutnya, barang akan diberitakan telah sampai di Indonesia namun pihak kurir palsu mengaku tidak bisa mengirimkan barang karena membutuhkan pembayaran clearance.
- Kemudian, target akan diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke akun pelaku untuk pembayaran clearance.
- Setelah mengetahui ciri-ciri modus penipuan tersebut, sebaiknya jangan mudah percaya pada hadiah, sebelumnya pastikan kebenarannya dengan meminta bukti konkret.



A close-up portrait of Putri Ayudya, a young woman with dark hair, looking slightly to the right. She is wearing a light-colored, possibly white, button-down shirt. The background is dark, making her face and hair stand out.

PUTRI AYUDYA

Jadi Tokoh Film
Tumbal
Kanjeng Iblis

Foto Foto : Istimewa

ARTIS peran Putri Ayudya turut membintangi film horor terbaru yang berjudul Tumbal Kanjeng Iblis karya rumah produksi Visinema Pictures yang bekerjasama dengan Legacy Pictures.

Dalam film besutan sutradara Mizam Fadilah ini, Putri Ayudya memerankan tokoh bernama Rosa.

Usut punya usut rupanya Putri Ayudya sempat dibuat takut memerankan karakter Rosa. Apalagi ia blak-blakan tidak menyukai sosok Rosa.

“Tokoh ini lumayan memberikan mimpi buruk dan cukup takut untuk ke dalam karakter ini lebih dalam, karena saya sendiri enggak suka sama karakternya,” kata Putri Ayudya dalam peluncuran Poster dan trailer film Tumbal Kanjeng Iblis di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (5/12/2022).

“Kalau Anda ada di pihak yang sama, pasti enggak suka sama Rosa. Maksudnya bayangkan ada seorang seperti itu dalam hidup Anda,” tambah Putri Ayudya.

Kemudian aktris berusia 34 tahun ini menggambarkan bagaimana karakter seorang Rosa dalam film tersebut.

“Rosa ini baik hati, tapi cari cuan. Dia adalah ibu kost yang menurutku gender sekali, coba ya teman-teman ini kamar kosan yang dapat tempat parkir gratis ada mesin cuci listrik udah termasuk,” tutur Putri.

“Terus kan aku juga ramah ya. Sebenarnya Rosa sangat sayang sama keluarganya sama suaminya dan anakku sayang banget,” tambah Putri melanjutkan.

Adapun dalam film ini, Putri Ayudya berada akting dengan Sheryl Sheinafia, Miller Khan, Omar Daniel, Yunita Siregar, dan masih banyak lainnya.

Film Tumbal Kanjeng Iblis berkisah tentang kelompok aliran sesat yang memburu nyawa manusia sebagai tumbal.

Kelompok ini menyembah sosok Kanjeng Iblis. Film ini juga berfokus

pada karakter Tia (Sheryl) dan Rosa (Putri Ayudya).

Drama keluarga juga tersaji dalam film ini, yang mana seorang adik mencari sang kakak yang hilang.

Film Tumbal Kanjeng Iblis rencananya tayang di bioskop pada 22 Desember 2022.

Profil Putri Ayudya

Putri Ayudya merupakan perempuan kelahiran Jakarta 20 Mei 1988. Putri Ayudya dikenal sebagai seorang aktris yang kerap bermain dalam banyak film.

Putri Ayudya sendiri memulai karirnya sejak tahun 2008 silam gaes. Ia telah memerankan beragam karakter unik dan menarik di berbagai judul film.

Putri Ayudya mulai menyukai dunia akting sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Saat itu ia juga tergabung dalam dunia teater. Hobi aktingnya tersebut ia teruskan hingga duduk di bangku kuliah.

Saat duduk di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Putri Ayudya dan teman-temannya mendirikan Teater Psikologi pada 18 Oktober 2007 silam gaes. Ia juga terlibat sebagai produser dalam beberapa pementasan teater.

Pada tahun 2000-an, Putri Ayudya mulai mendapat tawaran dalam beberapa judul sinetron. Salah satu sinetron yang ia perankan saat berjudul 1001 Cara Menggaet Cowok.

Dari situlah, Putri Ayudya mendapat tawaran lainnya di dunia film. Beberapa film yang telah melibatkan Putri Ayudya sebagai aktornya seperti Rock N Roll, Guru Bangsa: Tjokroaminoto, Bangkit, Kafir: Bersekutu dengan Setan, Down Swan, Gundala, Mudik, dan masih banyak lagi.

Selain berkarier sebagai seorang aktris, Putri Ayudya juga sempat menjadi host untuk acara petualangan seperti Jejak Petualang. Nggak cuma itu, Putri Ayudya juga pernah menjadi pembawa acara Selamat Pagi dan Reportase gaes (Kompas)



ENAM PANTANGAN SAAT ANDA SAKIT TENGGOROKAN



SAKIT tenggorokan adalah saat Anda merasakan sakit, gatal, atau iritasi di tenggorokan dan bisa terasa lebih buruk saat Anda menelan.

Saat cuaca dingin mereda, begitu pula sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan itu bisa mengganggu.

Dimana bahkan hanya menelan cairan saja bisa menyakitkan, apalagi makan.

Saat mengalami sakit tenggorokan, ada beberapa makanan yang harus dihindari agar sakit Anda tidak bertambah parah, berikut daftarnya.

1. Snack

Makanan seperti keripik, kerupuk, dan makanan sejenis lainnya mungkin terasa tajam saat ditelan dan menambah rasa sakit dan iritasi.

Tapi bergerigi dari makanan ini bisa menusuk tenggorokan Anda yang sudah sakit sehingga makin sakit.

2. Buah jeruk

Jeruk mengandung vitamin C, yang sangat bagus saat Anda sakit. Namun,

jika keasaman buah-buahan segar seperti jeruk, lemon, dan limau meningkatkan rasa geli di tenggorokan saat Anda memakannya, maka sebaiknya dihindari sampai sakit tenggorokan Anda mereda.

Jus, es loli, dan smoothie yang dibuat dengan buah jeruk juga dapat menyebabkan iritasi, jadi tunda sementara jika mengganggu Anda.

Untuk meredakan sakit tenggorokan dengan jeruk, peras irisan ke dalam teh hangat atau bahkan dengan air hangat dan madu.

Untuk meredakan sakit tenggorokan dengan jeruk, peras irisan ke dalam teh hangat atau bahkan dengan air hangat dan madu. Anda juga bisa beralih ke makanan lain dengan vitamin C yang lebih lembut.

3. Makanan asam

Sama seperti buah jeruk, makanan asam seperti saus tomat bisa mengiritasi tenggorokan Anda. Jika ya, hindari sementara sampai rasa sakit Anda mereda.

4. Makanan pedas

Bagi sebagian orang, ketika sakit tenggorokan mereka perlu menghindari saus pedas atau sriracha. Jenis makanan ini mungkin mengiritasi area di tenggorokan yang meradang atau semakin mengiritasi tenggorokan.

5. Sayuran mentah dan keras

Batang wortel dan seledri memang sehat, tetapi teksturnya yang keras bisa membuat tenggorokan teriritasi. Maka pilihlah sayuran yang dimasak atau bahkan sayuran yang dihaluskan seperti kentang tumbuk.

6. Gorengan

Meskipun ayam goreng dan onion ring mungkin enak dimakan saat Anda sakit, lapisan kasarnya bisa mengiritasi sakit tenggorokan Anda.

Hindari sampai gejala Anda mereda dan ingatlah untuk memilih makanan yang digoreng dalam jumlah kecil karena itu bukan pilihan yang paling sehat, terutama saat Anda sakit (Bisnis)



GORENGAN



SAYURAN MENTAH DAN KERAS



SNACK



BUAH JERUK



MAKANAN ASAM



MAKANAN PEDAS

ROBOT KAPAL

BAWAH AIR

TANPA AWAK



Foto : eng.ui.ac.id

TIM Autonomous Marine Vehicle (AMV) Universitas Indonesia (UI) berinovasi merancang robot kapal bawah air tak berawak (nirawak) atau autonomous underwater vehicle (AUV) yang diberi nama Makara Perry, dan berhasil meraih juara 2 pada Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN) 2022.

Dekan Fakultas Teknik UI, Prof. Dr. Heri Hermansyah di Kampus UI Depok, Jawa Barat, memberikan apresiasi terhadap rancangan Makara Perry.

Rancangan robot dengan desain AUV ini, kata dia, menjadi bukti bahwa mahasiswa UI dapat membuat inovasi teknologi desain, pembuatan prototipe, dan performa prototipe di bidang teknologi perkapalan dan maritim.

"Capaian yang telah diraih AMV UI di kancah nasional ini pun membuktikan bahwa mahasiswa FTUI adalah mahasiswa yang unggul dan berdampak," katanya.

Makara Perry mengintegrasikan beberapa komponen, elemen "depth"

sensor, misalnya berfungsi agar robot dapat mengetahui kedalaman dari kolam atau medannya.

Lalu, computer vision yang merupakan kamera berjenis Razer Kiyo X berfungsi sebagai input gambar untuk AUV dengan resolusi dan frame rate yang tinggi, sehingga AUV dapat melakukan image processing.

Salah seorang anggota Tim AMV UI (Tenik Elektro 2020) Valerie Olive Suryono mengatakan mereka juga mengintegrasikan computing device jenis Nvidia Jetson Xavier NX, mini komputer dengan waktu proses yang cepat yang memungkinkan AUV Makara Perry melakukan tugas-tugas seperti image processing, object recognition, dan data aggregation secara paralel.

"Konfigurasi thruster yang digunakan adalah empat thruster vertikal yang disusun sedemikian rupa untuk membantu ASSD melakukan heave and roll, sedangkan untuk bidang horizontal, ASSD menggunakan pendorong dan kemudi untuk melakukan gerakan surge dan

yaw. Dengan demikian, drone dapat bermanuver pada lima derajat kebebasan," katanya.

Komponen-komponen tersebut ditempatkan pada dua enclosure kedap air berbahan dasar akrilik. Enclosure Makara Perry dirancang secara khusus untuk mengakomodasi komponen-komponen elektrik yang ada pada AUV rancangan tim AMV UI.

KKCTBN 2022 diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI).

Pada ajang kompetisi tersebut, Tim AMV UI bertanding pada kategori Performa dan Prototipe Kapal

Autonomous Semi Submarine Drone.

KKCTBN 2022 merupakan salah satu agenda lomba inovasi teknologi desain, pembuatan prototipe, dan performa prototipe di bidang teknologi perkapalan dan maritim. Ajang ini merupakan kompetisi bagi mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun (Ant)



Tim Makara Perry UI





SEPATU VOLI BISA JADI TREN FESYEN



SEPATU voli memiliki potensi untuk berkembang menjadi tren fesyen baru di masyarakat.

"Saat ini penggunaan sepatu olahraga seperti basket yang dikawinkan dengan tren street-wear bukan lagi hal yang aneh, tetapi jadi budaya. Dengan basis penggemar yang besar, bukan tidak mungkin penggunaan sepatu voli untuk mendukung fesyen jadi sesuatu yang happening di tahun mendatang," kata Shella Bernadetha, benteng pertahanan Timnas Voli Perempuan Indonesia.

Selain fisik yang mumpuni, olahraga voli membutuhkan alat

pendukung untuk mendongkrak performa di lapangan, sepatu salah satunya. Sepatu voli umumnya memiliki sol yang tebal sehingga memiliki daya cengkram yang kuat untuk menjaga stabilitas pemain di permukaan lapangan.

Kekhasan lain sepatu voli adalah bobot sepatu voli relatif ringan. Hal tersebut tentu ditujukan untuk membantu para pemain untuk leluasa bergerak, mulai dari berlari hingga melompat ketika memainkan bola. Dari sisi penggunaan bahan, produsen sepatu voli memiliki beragam inovasi mulai dari polyester, mesh, bahkan ada yang menggunakan bahan kulit sintesis.

Belakangan, sepatu voli yang beredar di pasaran juga mulai menonjolkan sisi estetika dan desain yang menarik. Bahkan tak jarang produsen yang menggabungkan performa serta lifestyle ketika mengembangkan produknya.

FIXCH merilis sejumlah model sepatu voli di antaranya Blitzkrieg dan Berlin.

Blitzkrieg hadir dengan membawa siluet yang sangat berbeda dari merk lain.

Inovasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menggabungkan konsep olahraga dan lifestyle sebagai keunggulan FIXCH untuk mempopulerkan olahraga voli bagi seluruh kalangan.

Blitzkrieg ditunjang dengan material upper dengan teknologi METAKINIT, yaitu teknologi rajut yang akan menyesuaikan bentuk kaki sehingga lebih fit dan dapat menambah kenyamanan ketika digunakan.

Selain itu, faktor lain yang menjadi unggulan artikel produk ini adalah para penggunanya tetap akan mendapatkan sensasi nyaman serta stabil ketika melakukan lompatan karena didukung oleh lapisan reinforce khusus pada area midsole.

Hadir bersamaan dengan Blitzkrieg artikel produk Berlin hadir dengan kesan kokoh namun ringan. Dibekali dengan perpaduan teknologi VEXTOM Squeeze, FIXCH Berlin akan terasa lebih nyaman ketika digunakan dalam setiap pertandingan.

Dengan desain yang kokoh, sepatu ini tetap mengutamakan sirkulasi udara kaki penggunanya dengan menyematkan teknologi DYNABREATH. Sepatu mid-cut ini akan menjaga posisi kaki anda lebih

stabil saat mendarat di setiap lompatan.

Sementara itu FIXCH Anthem layak mendapat predikat sebagai salah satu sepatu dengan bobot ter-ringan dalam skena olahraga bola Voli. Karakteristik low khas ANTHEM akan memberikan fleksibilitas tinggi untuk setiap pergerakan di lapangan ketika smash bahkan saat menerima bola. Low cut seperti ini cocok untuk digunakan berbagai posisi baik libero hingga spiker.

Tidak hanya cutting, FIXCH – Anthem juga menjaga anda tetap stabil di lapangan karena teknologi DURAGRIP yang akan mengurangi selip ketika berakselerasi cepat dalam menerima bola sepatu ini memiliki kapabilitas jika dimainkan di lapangan Indoor maupun Outdoor (Ant)

Blitzkrieg



Berlin



KUHP Baru Bikin(dari hal 1)

AKSI unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) patut yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (6/12) malam dibubarkan kepolisian.

Aksi berlangsung dari sekitar pukul 14.40 WIB hingga sekitar pukul 18.26 WIB. Massa akhirnya bubar setelah mendapat peringatan dua kali dari Polres Metro Jakarta Pusat. Pada peringatan pertama disampaikan, saat mereka masih menyampaikan orasinya. Menggunakan pengeras suara massa diminta mengakhiri unjuk rasa.

"Waktu susah menunjukkan pukul 18.00 WIB, harap menaati waktu. Kami imbau dan memohon kepada saudara kami yang berunjuk rasa depan gedung DPR agar dapat menaati dan menghormati waktu penyampaian di muka umum," kata polisi pada peringatan pertama. Pada saat itu massa aksi masih bertahan. Mereka juga sempat bernegosiasi dengan kepolisian. Hingga akhirnya usai peringatan kedua, mereka bubar jalan.

Terpisha, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan pernyataan pemerintah yang menyarankan warga untuk menggugat RKUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika tidak setuju dengan pasal-pasal di dalamnya sulit diterima.

Bivitri pesimistis hakim MK akan menerima gugatan dan mengambil putusan yang objektif. Menurut Bivitri, hakim MK dibayang-bayangi pemecatan jika putusan tak sesuai dengan kehendak pemerintah dan DPR.

Bivitri berkata kekhawatiran itu muncul sebab ada preseden Aswanto yang diberhentikan dari kursi hakim MK karena dianggap tak mengawal kepentingan DPR.

"Soal RKUHP, Wamenkumham bilang kalau enggak setuju bawa aja ke MK. Nah MK-nya udah kayak gini gimana dong? Mereka akan mikir seribu kali kalau nanti mereka menyebut pasal pasal di RKUHP itu inkonstitusional karena takut 'Diaswantokan'," kata Bivitri.

Bivitri menyebut pengekanan terhadap MK itu akan diperparah jika dalam revisi UU MK memuat pasal-pasal yang melemahkan, salah satunya terkait syarat pencopotan hakim. Meskipun, kata Bivitri, MK baru-baru ini mengeluarkan putusan nomor 103/PUU-XX/2022 yang mengatakan pemberhentian hakim konstitusi harus dilakukan sesuai aturan Pasal 23 UU MK. Namun, DPR tetap ingin merevisi UU tersebut.

"Mau ada revisi UU MK, yang akan bisa mengevaluasi hakim mana pun yang dianggap membangkang. Jadi sekarang revisi UU MK mau dibahas yang mengusulkan DPR juga," ujarnya.

Bivitri menyatakan Presiden Jokowi harus turun tangan. Ia menyebut kekuasaan hakim tidak boleh diacak-acak lantaran berdampak panjang pada kepentingan masyarakat yang sulit menggugat aturan merugikan. "Enggak boleh

kekuasaan kehakiman diacak-acak seperti itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Bivitri menyebut KUHP baru berbahaya dan dapat merusak demokrasi di Indonesia. Ia menyebut RKUHP yang bakal disahkan hari ini masih memuat pasal bermasalah. "Jadi yang terjadi adalah kerusakan negara hukum dan demokrasi," kata Bivitri.

Untuk diketahui, DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat Paripurna hari ini, Selasa (6/12). Meskipun, masih memuat pasal-pasal yang kontroversial.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyebut agenda pengesahan itu sesuai keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward OS Hiariej menyebut pintu MK terbuka lebar bagi para pihak yang tidak setuju terhadap rencana pengesahan Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana atau RKUHP.

Eddy, sapaan akrabnya, mempersilakan para pihak yang tak setuju terhadap RUU tersebut untuk menggugat ke MK. "Kalau ada warga masyarakat yang merasa hak konstitusional dilanggar pintu Mahkamah Konstitusi terbuka lebar," katanya.

Pengunjuk rasa menilai KUHP merupakan produk hukum negara yang dibentuk secara tidak partisipatif dan tidak transparan. "Bahkan draf terbaru dari rancangan aturan ini baru dipublikasi pada tanggal 30 November 2022 dan masih memuat sederet pasal bermasalah yang selama ini ditentang oleh publik, karena akan membawa masyarakat Indonesia masuk ke masa penjajahan oleh pemerintah sendiri," ucap Ketua YLBHI Muhamad Isnur.

Berdasarkan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, pasal-pasal yang terkandung dalam draf akhir RKUHP masih memuat pasal-pasal antidemokrasi, melanggengkan korupsi di Indonesia, membungkam kebebasan pers, menghambat kebebasan akademik, mengatur ruang privat seluruh masyarakat, diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marginal, mengancam keberadaan masyarakat adat dan memiskinkan rakyat. "Aturan ini lagi-lagi menjadi aturan yang tajam ke bawah, tumpul ke atas karena mempersulit jeratan pada korporasi jahat yang melanggar hak masyarakat dan pekerja," sambung dia.

'Diskon' Bagi Koruptor-Pelanggar HAM

KUHP baru mengubah paradigma pembalasan menjadi pidana modern berupa keadilan korektif, keadilan restoratif, serta keadilan rehabilitatif. Salah satu cirinya memberi pemaafan bagi narapidana yang berkelakuan baik saat menjalani masa pidana. Termasuk terpidana korupsi.

"RUU KUHP tidak lagi berorientasi pada keadilan retributif, yaitu keadilan yang mengutamakan balas dendam, tetapi berorientasi pada paradigma hukum pidana modern," ujar Wamenkumham Edward OS

Hiariej.

Salah satu yang diaturnya adalah soal pidana penjara seumur hidup. Dengan KUHP yang disahkan hari ini, terpidana bisa mendapatkan sunat hukuman bila berkelakuan baik dalam 15 tahun pertama menjalani pidana penjara.

Selain itu, kasus pelanggaran HAM ada 'tanggall kedaluwarsanya'. Bila lewat tanggal kedaluwarsa, kasus tak bisa diproses. "Ketentuan itu tentu akan menjadi hambatan dalam penegakan hukum untuk tindak pidana berat," kata Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Anis Hidayah.

Anis Hidayah menyoroti perbedaan antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dengan RUU KUHP yang baru disahkan DPR tadi. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Genosida adalah pemusnahan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau kelompok agama. Kejahatan kemanusiaan adalah serangan meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil.

Dalam UU tentang Pengadilan HAM, hukuman minimal untuk pelanggaran HAM berat adalah 10 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 36 di UU Nomor 26 Tahun 2000 tersebut. Namun di KUHP yang baru disahkan DPR, hukuman minimal 'didiskon' 5 tahun.

Apakah nantinya penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM berat tetap menggunakan asas *lex specialis*? Artinya, penegak hukum tetap memakai UU Pengadilan HAM dan bukan memakai KUHP yang baru?

Anies memahami, berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 620 di KUHP yang baru, ketentuan tentang tindak pidana khusus (termasuk pelanggaran HAM berat di dalamnya) dilaksanakan oleh penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang masing-masing. Namun ketentuan pidananya tetap menggunakan KUHP yang baru ini. Namun penerapan KUHP yang baru akan dimulai pada tiga tahun lagi. "Ketentuan pidananya direduksi oleh KUHP," kata Anis.

Investor Bisa Lari

Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Kim ikut bersuara soal revisi UU KUHP di Indonesia. Ia mengatakan pasal-pasal mengenai ranah privat atau moralitas berpotensi membuat investor asing lari dari Indonesia. "Kami tetap prihatin bahwa pasal-pasal moralitas yang mencoba mengatur apa yang terjadi dalam rumah tangga antara orang dewasa yang saling menyetujui dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia," ujarnya dalam acara US-Indonesia Investment Summit di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12).

Menurut Sung Kim, mengkriminalkan keputusan pribadi individu akan menjadi bagian besar dalam matriks keputusan banyak perusahaan dalam menentukan apakah akan berinvestasi di Indonesia atau tidak. "Hasilnya dapat mengakibatkan ber-

kurangnya investasi asing, pariwisata, dan perjalanan," imbuhnya.

Ia menambahkan penting untuk melanjutkan dialog dan memastikan saling menghormati satu sama lain, termasuk orang-orang LGBT QI+. "Negara-negara seperti Indonesia dan AS dapat saling belajar tentang cara memastikan masyarakat inklusif untuk semua," paparnya.

Pengusaha AS, kata dia, ingin menerima aturan jelas di suatu negara, sehingga mereka bisa memprediksi dampak potensial terhadap usaha. "Di seluruh dunia, undang-undang tidak jelas, pengusaha seringkali enggan berinvestasi karena mereka tidak yakin bagaimana undang-undang yang berbeda dapat mempengaruhi operasi bisnis mereka," ujarnya.

Sebagai informasi RKUHP memang mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang perzinahan. Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun.

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadakan atau dengan kata lain delik aduan. (wid,ant,ist,rls/dya)

PASAL YANG MASIH JADI SOROTAN

1. Pasal 240 - Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara

Dalam pasal ini, penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dilebur menjadi satu pasal dan menjadi delik aduan secara terbatas, yaitu untuk penghinaan yang tidak mengakibatkan kerusakan. Tidak sejalan dengan cita-cita demokrasi. Pasalnya, perbuatan "penghinaan" tidak perlu dipidana karena akan selalu sulit dibedakan dengan kritik.

2. Pasal 81 - Pidana denda

Pasal ini mengatur jika pidana denda tidak dibayarkan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Jika setelah penuntutan dan pelepasan pidana denda masih tidak terpenuhi, maka sisa denda dapat diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial.

3. Pasal 100 - Pidana mati

Rapat pembahasan RKUHP oleh pemerintah dan DPR pada 24 November 2022 lalu menyepakati bahwa pemberian masa percobaan 10 tahun sebagai penundaan eksekusi pidana mati HARUS diberikan secara otomatis dan pada seluruh terpidana tanpa terkecuali. Dengan demikian, tidak perlu ada lagi pengantutan tentang hal-hal yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan masa percobaan 10 tahun tersebut, mengingat harus diberikan secara otomatis.

4. Pasal 256 - Unjuk rasa

Pasal 256 tentang larangan unjuk rasa tanpa pemberitahuan yang mengakibatkan terganggunya pelayanan publik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 10 juta.

5. Pasal 188 - Penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau Paham Lain yang bertentangan dengan Pancasila

Dalam rapat pembahasan RKUHP oleh pemerintah dan DPR pada 24 November 2022 lalu, tidak ada sama sekali pembahasan mengenai perubahan Pasal 188 tentang larangan penyebaran atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme. Namun, tiba-tiba ada perubahan rumusan pasal dengan menambahkan klausa "larangan penyebaran atau mengembangkan paham lain yang bertentangan dengan Pancasila".

Bharada E 'Diserang' di Sidang, Sambo: Dia yang Tembak Harusnya Dipecat

JAKARTA- Kesaksian pihak-pihak dalam sidang terkait dugaan pembunuhan berencana Brigadir J (Nofriansyah Yosua Hutabarat) banyak yang saling berpungguan alias berbeda. Mengenai pelecehan yang dialami istri Sambo, Putri Candrawath mislanya, Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo mengatakan ada pemerkosaan. Sementara mantan Karo Provos Propam Polri Benny Ali memberi kesaksian yang berbeda yaitu 'memegang paha'.

Tak hanya itu, Ferdy Sambo juga mulai 'menyerang' Bharada E (Richard Eliezer). Dia menyinggung posisi manatn anak buahnya itu yang hingga kini belum menjalani sidang etik di Polri. Padahal Eliezer saat ini menjadi salah satu terdakwa kasus pembunuhan Yosua.

Mantan Kadiv Propam Polri itu mengaku tidak tahu soal proses etik Eliezer di Polri. Namun, kata dia, seharusnya Eliezer juga dipecat seperti para tersangka lainnya karena dia juga ikut menembak Yosua.

"Bharada E [Richard Eliezer] harusnya dipecat juga, karena dia yang menembak, kan. Jangan tanya saya," kata Sambo kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai menjalani sidang lanjutan, Selasa (6/12).

Hingga saat ini, Eliezer belum disidang etik oleh Polri. Belum ada keterangan teranyang disampaikan oleh pihak Kepolisian. Dalam kasus ini, Eliezer didakwa menembak Yosua. Dalam dakwaan, dia menembakkan 3 sampai 4 peluru ke tubuh Yosua atas perintah dari Sambo. Kemudian diakhiri dengan tembakan pamungkas ke arah kepala oleh Sambo. Meski, Sambo membantah turut menembak.

Di sisi lain, Eliezer sekarang tengah mengajukan diri sebagai saksi pelaku alias justice collaborator (JC). Status ini memungkinkan dia mendapatkan pengurangan hukuman dari hakim. Bahkan dalam persidangan, dia sempat disebut hakim telah membuka kotak pandora pembunuhan Yosua.

Dalam keterangannya, Eliezer mengaku kalau tembakan terhadap Yosua itu adalah perintah Ferdy Sambo. Bukan peristiwa tembak-menembak sebagaimana skenario Sambo. Keterangan itu didukung dengan bukti CCTV Yosua masih hidup saat Sambo tiba di Duren Tiga. Tabir terungkap. Sambo dkk yang terlibat pun dijerat pidana.

Dalam kasus ini, Eliezer didakwa bersama Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Mereka didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Kelimanya didakwa melanggar Pasal 338 KUHP atau 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Isu Pelecehan Masih 'Suram'

Seperti diketahui, Mantan Kadiv

Propam Polri Ferdy Sambo saat bersaksi mengatakan usai peristiwa penembakan Brigadir J, Benny mengaku dihubungi oleh Sambo yang bercerita soal peristiwa tembak menembak di rumah Dinas Duren Tiga.

Putri lalu menjelaskan bahwa peristiwa bermula saat dirinya pulang dari Magelang, Jawa Tengah. Ia tengah beristirahat dengan mengenakan celana pendek di rumah dinas Duren Tiga. Saat itu, Putri mengaku dilecehkan oleh Brigadir J. Putri mengaku Brigadir J telah menggerayangi tubuhnya. Brigadir J disebut memegang bagian tubuh Putri salah satunya paha.

"Apa yang diceritakan tentang pelecehan itu?" tanya hakim. "Di pegang-pegang," jawab Benny.

"Paha?" tanya hakim lagi. "Iya," jawab Benny.

Sementara dalam sidang yang sama, Sambo meyakini bahwa istrinya Putri diperkosa oleh Yosua.

Hal itu disampaikan Sambo untuk membantah pernyataan Richard Eliezer Pudihiang Lumiu atau Bharada E beberapa waktu lalu yang mengungkap sosok wanita misterius di rumah Sambo yang berada di daerah Bangka, Jakarta Selatan sebelum Yosua tewas ditembak.

Menurut Sambo, keterangan yang disampaikan oleh Bharada E hanya fiktif belaka. "Tidak benar keterangan dia itu, ngarang-ngarang. Jelasnya istri saya kan diperkosa sama Yosua. Tidak ada motif lain apalagi itu perselingkuhan," kata Sambo.

Dihubungi terpisah, Pengacara Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak mengatakan pernyataan Sambo soal pemerkosaan itu adalah tuduhan prematur. "Saya pikir itu tuduhan yang prematur, manakala di dalam surat dakwaan disampaikan bahwa hal tersebut hanyalah klaim sepihak yang belum tentu pasti kebenarannya," kata Martin.

Ia mengatakan tuduhan Sambo itu juga tidak didukung oleh keterangan saksi. "Dalam hari ini, Putri Candrawathi itu posisinya bukan sebagai korban, dia sebagai terdakwa yang memiliki hak ingkar. Hak dia sebagai korban sudah gugur manakala laporan yang mereka sampaikan di Polres Metro Jakarta selatan sudah gugur," kata Martin.

Terpisah, tim pengacara keluarga Ferdy Sambo, Arman Hanis, meminta pemeriksaan terhadap Putri Candrawathi di sidang perkara Bharada Richard Eliezer dkk dilakukan secara tertutup. Sebab, menurut Arman, hal itu menyangkut kekerasan seksual.

"Saudara Putri dipanggil sebagai saksi pada tanggal 27 Oktober 2022 kami mengajukan permohonan



kepada majelis hakim yang kami tindak lanjut ditanggal 6 Desember permohonan agar pemeriksaan terhadap Ibu Putri sebagai saksi maupun terdakwa dapat dilakukan secara tertutup karena menyangkut kekerasan seksual," kata Arman saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (6/12).

Hakim ketua Wahyu Iman Santoso langsung menolak permohonan itu. Sebab, hakim menilai pasal yang didakwakan kepada Putri adalah pasal pembunuhan bukan asusila. "Mengenai tertutup kami tidak bisa mengabulkan, karena terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan bukan asusila," tegas hakim.

"Bahwa di dalam tindak pidana tersebut ada asusila itu merupakan kebetulan, dan kita meminta teman-teman pers maupun teman-teman pengunjung untuk lebih selektif," imbuh hakim.

Arman Hanis kemudian

menjelaskan aturan Mahkamah Agung (MA) tentang keterangan saksi yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Keputusan hakim yakni tetap melanjutkan sidang Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf besok, tapi saksinya Ferdy Sambo. Pemeriksaan Putri ditunda hingga Senin (12/12).

"Berdasarkan pedoman mengadili perkara perempuan tentang berhadapan dengan hukum Yang Mulia, yang disusun MA masyarakat membantu peradilan Indonesia, yang diterbitkan pada 2017, saksi memberikan keterangan terkait kekerasan seksual dapat dilakukan pemeriksaan dengan secara tertutup itu dasar hukumnya Yang Mulia, bukan hanya tindak pidana kekerasan seksual," ucap Arman.

"Kalau begitu, untuk besok yang kita perintahkan saudara Ferdy Sambo dulu, baru hari Seninnya kita jadwalkan Putri, gitu ya jaksa, besok Sambo tolong dihadirkan sebagai saksi," tegas hakim. (wid,ist,rls/dya)

RINCIAN ANGGARAN POLRI DALAM RAPBN 2023

